SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/HUK/2023
TENTANG
PENGGUNAAN BAGAN AKUN STANDAR DALAM PENYALURAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS SERTA BANTUAN BAGI ANAK YATIM PIATU

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 di Kementerian Sosial, perlu menyusun kebijakan penyaluran bantuan sosial berdasarkan *nature of account* anggaran bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penggunaan Bagan Akun Standar dalam Penyaluran Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas serta Bantuan bagi Anak Yatim Piatu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

jdih.kemensos.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGGUNAAN BAGAN AKUN STANDAR DALAM PENYALURAN BANTUAN PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS SERTA BANTUAN BAGI ANAK YATIM PIATU.

KESATU : Menetapkan ketentuan penggunaan bagan akun standar dalam penyaluran bantuan permakanan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas serta bantuan bagi anak yatim piatu.

KEDUA : Penggunaan bagan akun standar dalam penyaluran bantuan permakanan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

KETIGA : Penggunaan bagan akun standar dalam penyaluran bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

jdih.kemensos.go.id

KEEMPAT : Penggunaan bagan akun standar dalam penyaluran bantuan bagi anak yatim piatu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

KELIMA : Penggunaan bagan akun standar dalam penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA menggunakan akun:

a. 571111 untuk belanja bantuan sosial rehabilitasi sosial dalam bentuk uang; dan
b. 521233 untuk belanja barang pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang.

KEENAM : Penggunaan bagan akun standar dalam penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menggunakan akun 571111 untuk belanja bantuan sosial rehabilitasi sosial dalam bentuk uang.

KETUJUH : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id